

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian yang relevan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Salawati Dj. Hi. Abu (2017)	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi pada KUA Kecamatan Palu Selatan)	Pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga, untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. Dengan penyampaian materi-materi yang berkenaan dengan persiapan calon pengantin sebagai suami istri baik secara fisik	Penelitian yang dilakukan, dilaksanakan di KUA dan hanya ditunjukkan kepada calon pasangan pengantin yang ingin menikah.

			<p>maupun psikis, diantaranya penyampaian materi tentang kesehatan reproduksi dan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga lainnya. Serta dengan menggunakan metode ceramah memungkinkan peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing atau tutor.</p>	
2	<p>Muhammad Ilham Mustofa dan Soedjarwo (2020)</p>	<p>“Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin”</p>	<p>Bimbingan pra nikah dapat diselenggarakan dengan memperhatikan sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber, biaya serta sertifikat. Bimbingan pra nikah akan membentuk pemahaman melalui cara menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasikan. Bimbingan pra nikah memiliki keterkaitan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan, dilaksanakan di KUA dan hanya ditunjukkan kepada calon pasangan pengantin yang ingin menikah.</p>

			<p>dalam membentuk pemahaman tentang konsep keluarga sejahtera bagi calon pengantin.</p> <p>Dengan mengikuti bimbingan tersebut, calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan dari materi yang telah disampaikan, seperti prosedur perkawinan, pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami istri, peraturan perundang</p>	
3	<p>Ahmad Fahim Alwani Jumas (2021)</p>	<p>“Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga “Studi Kasus di</p>	<p>Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terhadap ketahanan keluarga dapat dinyatakan bahwa kegiatan bimbingan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam</p>	<p>Penelitian yang dilakukan berorientasi pada efekif dan dampak dari bimbingan perkawinan serta melakukan penelitian dengan</p>

		Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal”	membangun keluarga yang harmonis	fenomena kasus yang terjadi.
4	Neng Yunita Yulia (2021)	“Implementasi Kurikulum Pendidikan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”	Kurikulum yang digunakan sudah sesuai berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Terlihat dari cara penyuluh menyampaikan pembelajaran kepada para peserta.	Penelitian yang dilakukan dilaksanakan di KUA.
5	Dede Nurul Qomariyah, Ekha Wahyuni, Lippi Fiqriyan Pangestu, Moch. Alffi	“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya”	Bimbingan perkawinan dilakukan dalam upaya membekali calon pasangan dalam berkeluarga. Digulirkannya program bimbingan perkawinan dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian	Penelitian yang dilakukan dilaksanakan di KUA.

<p>Ridho, dan Restu Wijaya Dimas (2021)</p>	<p>di Indonesia yang semakin meningkat sehingga program tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan angka perceraian.</p>	
---	--	--

## 2.2 Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan rangkaian teori sebagai acuan untuk menyampaikan penelitian ini, dan peneliti menggunakan teori sebagai analisis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Teori mencakup pendapat pendapat dan ide. Selanjutnya didefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.<sup>1</sup> Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan berbagai konsep teoritis konseptual yang akan digunakan untuk menyusun proposal ini.

---

<sup>1</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017, 203.

### 2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Carl I. Friedrich mendefinisikannya kebijakan publik sebagai serangkaian yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu dimana keputusan itu pada prinsipnya harus berada dalam kekuasaan aktor tersebut untuk mencapai tujuan. Kebijakan Publik adalah perilaku yang berorientasi pada tujuan dari pihak pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang menentukan tujuan dan menetapkan cara untuk mencapainya.<sup>3</sup>

Stella Theodoulou dalam *Public Policy: The Essential Readings* (2005) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik pada dasarnya adalah pergerakan

---

<sup>2</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017, 203

<sup>3</sup> *Ibid* hal 204.

dari munculnya masalah, untuk ditempatkan pada agenda kebijakan dan akhirnya, untuk diundangkan dan direfleksikan efektivitasnya. Proses kebijakan publik dengan demikian dapat dibagi menjadi enam tahapan diantaranya:<sup>4</sup>

- 1) Pengenalan Masalah (*Problem Recognition*): Masalah yang berpotensi dimasukkan ke dalam agenda kebijakan publik yang diakui.
- 2) Pengaturan Agenda (*Agenda Setting*): Masalah-masalah yang dianggap perlu diperhatikan dimasukkan ke dalam agenda.
- 3) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*): Berbagai kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah yang telah ditetapkan di dalam agenda.
- 4) Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*): Kebijakan resmi disepakati
- 5) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*): Kebijakan publik yang disepakati secara sah harus diterapkan.
- 6) Analisis Kebijakan dan Evaluasi (*Policy Analysis and Evaluation*): kebijakan yang diterapkan dievaluasi efektivitasnya.

Ketika suatu kebijakan publik ditetapkan menjadi kebijakan publik, maka kebijakan itu menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik itu akan menjadi undang-undang yang harus ditaati. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal 205.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 di Kota Depok tentang peningkatan ketahanan keluarga merupakan kebijakan publik.

### 2.2.2 Teori Implementasi

Riant Nugroho (Nugroho, 2003:158) mendefinisikan secara prinsip bahwa implementasi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, dan implementasi adalah prinsip tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, ada 6 indikator yang berpengaruh terhadap kinerja publik, yakni: <sup>5</sup>

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, keberhasilan dari suatu implementasi program dapat diukur apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan yang dibuat tersebut pragmatis dengan keadaan budaya dari masyarakat tempat implementasi itu dilakukan.
2. Sumber daya, implementasi suatu kebijakan juga diukur dari kemampuan dalam memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada.
3. Karakteristik Agen Pelaksana, indikator yang dapat dijadikan dalam karakteristik agen pelaksana ialah organisasi nonformal dan formal yang berperan dalam implementasi kebijakan.
4. Sikap Pelaksana, sikap dari seorang agen pelaksana baik penerimaan atau penolakan juga akan mempengaruhi dari keberlangsungan implementasi kebijakan suatu program.

---

<sup>5</sup> Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008:141-144.



5. Komunikasi, antar organisasi, koordinasi yang baik antara agen pelaksana dengan para pihak-pihak yang terlibat akan menciptakan suasana kerja yang baik, sehingga impleemntasi dapat dilangsungkan dengan lancar.
6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik juga merupakan indikator yang sangat menentukan implementasi dari suatu program. Sebab dalam pandangan Van Meter dan Van Horn apabila terdapat suatu lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif, maka akan berakibat buruk terhadap implementasi yang dijalankan di lingkungan tersebut.

Pada dasarnya model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ini tidak bertujuan untuk menilai hasil akhir dari kebijakan pemerintah, melainkan untuk menjabarkan bagaimana pencapaian suatu program seharusnya yang dapat dibandingkan dengan indikator yang telah peneliti sebutkan diatas.

Menurut Merliee S Grindle implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) serta area kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya ialah bahwa sehabis kebijakan ditransformasikan dilakukan implementasi kebijakan.<sup>6</sup> Isi kebijakan (content of policy) mencakup:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
2. Tipe khasiat yang dihasilkan;
3. Derajat pergantian yang diinginkan;
4. Peran pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana program;

---

<sup>6</sup> Neilson, Stephanie. *Knowledge Utilization and Public Policy Processes*. 2011:45-46.

6. Sumber energi yang dikeluarkan.

Sebaliknya Area Kebijakan (content of implementation) mencakup:

1. Kekuasaan, Kepentingan serta strategi aktor yang ikut serta;
2. Ciri lembaga serta penguasa,
3. Kepatuhan serta energi tanggap.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu, serta kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Ketika pemerintah merumuskan kebijakan, pertama-tama harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut akan berdampak baik atau buruk bagi masyarakat. Tujuan dari kebijakan dibuat bukan untuk bertentangan dengan masyarakat, bahkan sampai merugikan masyarakat.

### **2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Secara ontologis, subjek penelitian implementasi harus memahami fenomena implementasi kebijakan publik, misalnya: (i) mengapa tidak ada kebijakan publik yang diterapkan di wilayah tertentu; (ii) karena kebijakan publik itu sendiri, sebagaimana dirumuskan oleh pemerintah, berkinerja berbeda ketika dilaksanakan oleh pemerintah daerah; (iii) karena satu jenis kebijakan lebih ringan dari yang lain; dan (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi implementasi kebijakan yang efektif.

Donald Van Meter & Carl Van Horn mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor,

dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
- 2) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
- 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- 4) Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor

Mazmanian dan Sabatier (1979) menjelaskan pentingnya implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”<sup>7</sup>

Secara ringkas, implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan publik terwujudnya kebijakan publik; Artinya implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan implementasi kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memenuhi harapan yang diinginkan sehingga dapat terwujud.

---

<sup>7</sup> Erwan Agus, Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media, 2012, hal. 18

#### 2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sabatir (1986:268) menyebutkan, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variable utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variable tersebut adalah:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran.
- 4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
- 5) Dukungan para stakeholder.

#### 2.2.5 Teori George C. Edwards III

George Edward III (1980,1) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah kurangnya perhatian dalam pelaksanaannya. Dikatakannya, bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan para pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Edward menyarankan untuk memeperhatikan empat isu poko agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur brikorasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal 18

## 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan praktisi mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran apa yang harus disampaikan kepada khalayak sasaran. Jika tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Menurut George C. Edwards III terdapat tiga variabel dalam indikator komunikasi yaitu:

- a) Transmisi. Menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada sasaran kebijakan dan dari pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Kejelasan. Yang dimaksud adalah kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana kebijakan, target kelompok, dan pihak lain yang bersangkutan secara terperinci sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi, maksud dan tujuan, sasaran serta isi dari kebijakan sehingga pelaksana akan mengetahui apa yang harus di persiapkan dan dilaksanakan agar kebijakan tersebut tercapai.
- c) Konsistensi. Menyatakan, konsisten dari kebijakan agar kebijakan yang dilaksanakan tidak ada kesimpang siuran

sehingga menyebabkan kebingungan pelaksana kebijakan, target kelompok, dan pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

## 2) Sumber Daya

Meskipun kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif jika otoritas penegak hukum tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia baik darana maupun prasarana. Sumber daya adalah elemen terpenting untuk implementasi kebijakan.

Variabel yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Salah satu kegagalan umum dalam implementasi kebijakan adalah karena kurangnya atau tidak memadainya staf dan pegawai di bidangnya.
- b) Informasi tentang isi implementasi kebijakan, informasi terdapat dalam dua bentuk, yaitu informasi tentang bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan yang kedua adalah data tentang kepatuhan implementasi terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang pada umumnya, wewenang harus formal agar pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, undangan

---

<sup>9</sup> Widodo (2010:97)

adalah wewenang atau legitimasi para penegak untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d) Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, sejauh mungkin para pelaksana tidak memiliki kapasitas, kemampuan dan keterampilan, tetapi keberadaan sarana atau sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan akan gagal.

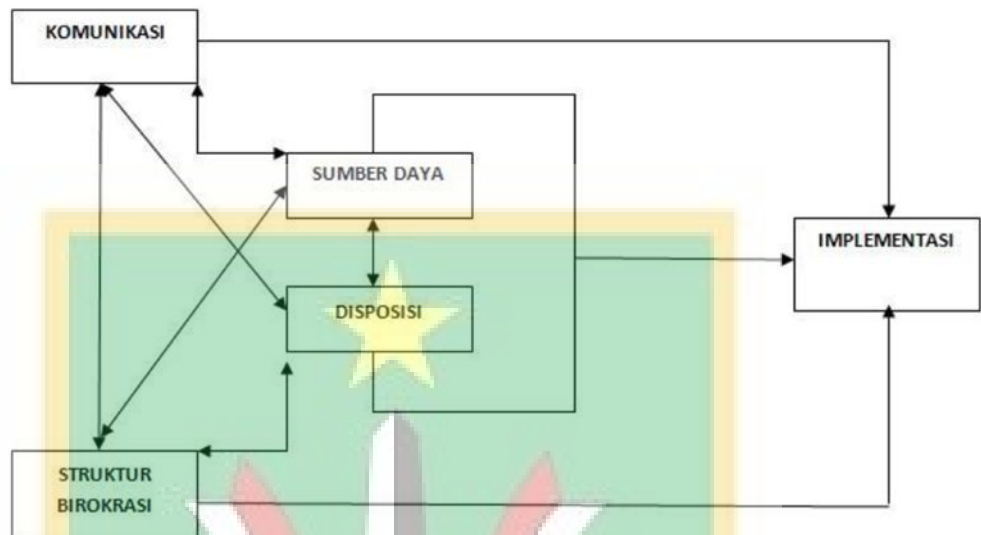
### 3) Disposisi

Kecenderungannya adalah karakter dan karakteristik praktisi, seperti komitmen, kejujuran dan kualitas demokrasi. Jika praktisi memiliki disposisi yang baik, ia dapat menerapkan langkah-langkah yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang seharusnya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar, atau SOP, yang berfungsi sebagai pedoman bagi praktisi untuk mengambil tindakan.

Gambar 2.1 Model Edward III



## 2.2.6 Bimbingan Pra Nikah

### 1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumberdaya manusia, oleh karenanya keluarga merupakan komponen utama untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiyar yang sungguh sungguh yang dimulai dari mempersiapkan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahglihat rumah tangga, calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mendapat keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama , mewujudkan keluargasehat berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai



keterampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang tentunya semakin berat.

Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumberdaya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu di terbitkan petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Menurut Syubandono agar seorang individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam menaiki jenjang perkawinan dan keluarga atau rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan-guncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.

Kursus Pranikah dalam Peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 adalah “Pemberian Bekal pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.

2. Dasar Hukum dikeluarkannya praturan pranikah adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
- b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- d) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- e) intruksi Presiden nomor 9 tahun 2002 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional.
- f) Keputusan Presiden RI nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
- g) Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

- h) Peraturan Presiden nomor 24 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementrian Negara.
- i) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah.

j) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

k) Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.

l) Surat edaran Menteri dalam Negara nomor 400/54/III?Bangda perihal pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah.

### 3. Tujuan Bimbingan Pranikah

a) Tujuan secara umum Mewuudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b) Tujuan secara khusus

1) Untuk menyamakan presepsi badan/lembaga penyelenggaraan tentang subtansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pranikah dan calon pengantin.

2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Adapun peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan Pranikah Keluarga Islami merupakan bagian dari kegiatan dakwah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga modern pada masa sekarang.

### 2.2.7 Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dimana keluarga mampu memanager sumber daya dan masalah dan masalah yang dihadapi agar mencapai kesejahteraan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.<sup>10</sup> Keluarga yang mampu beradaptasi, akan memiliki ketahanan secara ekonomi, psikologis, dan sosial untuk mengelola sumber daya fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh keluarga. Ketahanan Keluarga juga berasal dari kemampuan keluarga untuk mencapai tujuan yang sama dan menyatukan visi, misi, perasaan dan pemikiran yang bersinergi.<sup>11</sup>

#### 1. Tanda Adanya Ketahanan Keluarga

---

<sup>10</sup> Sunarti, E. *Ketahanan Keluarga*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor, 2013.

<sup>11</sup> Sunarti, E. *Inventori Pengukuran Keluarga* (ID). IPB Press, 2021.

- a) Seluruh anggota keluarga tulus penuh dengan cinta kasih dan saling memenuhi kebutuhan antar anggota keluarga.
- b) Suami istrimampu berinteraksi dan berkomunikasi baik secara fisik maupun emosional sehingga memiliki pernikahan yang berkualitas.
- c) Suami istri menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya untuk berkembang dan tumbuh menjadi manusia.

- d) Saling menghormati satu sama lain antar anggota keluarga.

## 2. Membangun Ketahanan Keluarga

- a) Pelihara dan kuatkan struktur di dalam keluarga.
- b) Jaga keberfungsian keluarga agar tetap bersinergi.
- c) Perlindungan keluarga.
- d) Jauhkan ancaman.
- e) Jauhkan kerentanan di dalam keluarga.
- f) Stabilitas dan ciptakan lingkungan yang sehat.

## 3. Komponen Ketahanan Keluarga

- a) Ketahanan Fisik, yaitu kemampuan ekonomi keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar diantaranya sandang, perumahan, pendidikan, dan Kesehatan.
- b) Ketahanan Sosial, yaitu kemampuan keluarga yang berasal dari eksternal ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial, interaksi keluarga dengan masyarakat, interaksi keluarga dalam hal media sosial, keikutsertaan keluarga di dalam kegiatan di dalam masyarakat, dan keutuhan keluarga.

- c) Ketahanan Psikologis, yaitu kemampuan keluarga yang berasal dari dalam keluarga, dalam hal peanggulangan masalah meliputi hubungan suami istri, pengasuhan, dan hubungan orangtua dnegan anak, manajemen koflik keluarga, serta kebersamaan keluarga.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Modul Sekolah Pranikah,2022.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

